



DINAMIKA PEMBELAJARAN SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA PADA PERMUKIMAN INFORMAL (Studi Kasus di Kampung Jodipan, Kota Malang)

**Nirwasita Daniswara^{1*}, Suhirman², Muhammad Ditya Satrianto³, Dian Yulie
Reindrawati⁴**

¹Universitas Tanjungpura

²Institut Teknologi Bandung

^{3,4}Universitas Airlangga

*Corresponding Author Email: nirwasitadaniswara@gmail.com



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: Permukiman informal yang kumuh sering kali dihadapkan pada masalah sosial, kesehatan, dan lingkungan. Salah satu solusi yang diadopsi adalah penataan ulang permukiman melalui pengecatan warna-warni. Studi kasus Kampung Warna-Warni Jodipan di Malang menunjukkan bagaimana transformasi melalui pengecatan warna-warni tidak hanya memperbaiki estetika tetapi juga meningkatkan ekonomi lokal dan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan pariwisata. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan Multi-Level Perspective (MLP) untuk menganalisis proses pembelajaran sosial dalam pengembangan pariwisata di permukiman informal. Temuan menunjukkan bahwa pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) oleh Dinas Pariwisata Kota Malang berperan penting dalam mengelola dan menjaga keberlanjutan kampung wisata. Namun, pandemi COVID-19 memberikan tekanan pada sektor pariwisata yang menyebabkan penurunan jumlah wisatawan dan penutupan sementara. Relasi kekuasaan dan komunikasi terbuka memainkan peran krusial dalam proses penataan ini, di mana inisiatif masyarakat dan sektor swasta membutuhkan persetujuan dari otoritas terkait. Forum diskusi dan dialog interaktif antara warga dan pengelola wisata membantu menciptakan kesepahaman bersama dan tindakan kolektif untuk menjaga kebersihan serta kepuasan wisatawan. Melalui komunikasi yang partisipatif, masyarakat dapat memahami dan berkontribusi dalam mewujudkan keberlanjutan pengembangan pariwisata.

Kata Kunci: Pembelajaran Sosial; Pengembangan Pariwisata; Permukiman Informal; Kampung Jodipan, Multi-Level Perspective (MLP)

Abstract: Informal settlements that are slums are often faced with social, health and environmental problems. One of the solutions adopted is the reorganization of settlements through colorful painting. The case study of Kampung Warna-Warni Jodipan in Malang shows how transformation through colorful painting not only improves aesthetics but also enhances the local economy and quality of life through tourism development. This research was conducted qualitatively using the Multi-

Level Perspective (MLP) approach to analyze the social learning process in tourism development in informal settlements. The findings show that the formation of Tourism Awareness Groups (Pokdarwis) by the Malang City Tourism Office plays an important role in managing and maintaining the sustainability of tourism villages. However, the COVID-19 pandemic put pressure on the tourism sector causing a decrease in the number of tourists and temporary closures. Power relations and open communication play a crucial role in this structuring process, where community and private sector initiatives require approval from relevant authorities. Discussion forums and interactive dialogues between residents and tourism managers help create a common understanding and collective action to maintain cleanliness and tourist satisfaction. Through participatory communication, the community can understand and contribute to the sustainability of tourism development.

Keywords: *Social Learning; Tourism Development; Informal Settlements; Jodipan Village; Multi-Level Perspective (MLP).*

PENDAHULUAN

Keberadaan permukiman informal tidak hanya memicu masalah keindahan kota, namun juga masalah internal bagi penghuni permukiman informal itu sendiri, seperti potensi kesenjangan sosial, masalah kesehatan, dan perilaku kriminal. Demikian juga dengan pelayanan kawasan tersebut yang kurang memadai, terutama untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan ruang terbuka ramah anak (Nassar & Elsayed, 2018). Selain itu, persoalan lingkungan juga menjadi permasalahan utama pada kawasan permukiman informal. Hal ini sebagaimana tertuang dalam temuan (Yuen & Kumssa, 2011) dimana penduduk di permukiman informal tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang layak, terpapar oleh air yang tercemar di dalam maupun di luar bangunan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk juga sistem drainase yang kurang baik yang menyebabkan terjadinya banjir ketika hujan deras.

Pemukiman informal di daerah perkotaan sangat rentan mengalami penurunan kualitas, membuat penduduk sulit mencapai kehidupan yang layak, bahkan cenderung berbahaya bagi para penghuninya. Melihat masalah ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas permukiman informal di daerah kumuh. Salah satu pendekatan untuk memperbaiki daerah informal adalah melalui penataan atau peremajaan permukiman dengan mempertimbangkan sejarah serta kondisi sosial dan lingkungan daerah yang akan ditata. Pendekatan ini kemudian menjadi kebijakan alternatif dalam mengatasi masalah tersebut (Hassan, 2012)

Upaya peningkatan permukiman informal juga berlangsung di beberapa kota di negara lain yang berlomba-lomba mencari solusi untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial di daerah permukiman informal. Seperti halnya pada peningkatan kualitas permukiman informal pada permukiman Rio de Janeiro di Brasil (Reynaud, 2004) dan Desa Gamcheon di Korea

Selatan (Kim & Holifield, 2024). Pemukiman informal di daerah kumuh mengalami pengembangan kawasan, yang kemudian diubah menjadi kawasan wisata.

Langkah ini dianggap sebagai alternatif untuk mengurangi masalah kumuh pada kawasan permukiman perkotaan. Lebih jauh lagi, peningkatan kualitas pada pemukiman informal dapat memunculkan kreativitas dalam mengembangkan pariwisata pada kawasan tersebut (Gato et. al., 2020). Selain itu, pengembangan pariwisata di pemukiman informal dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Dengan meningkatnya pendapatan, masyarakat setempat dapat meningkatkan kualitas hidup, seperti dengan memperbaiki fasilitas sanitasi atau infrastruktur.

Sementara itu, di Indonesia juga terdapat peningkatan pemukiman informal yang dapat menarik perhatian wisatawan dari dalam dan luar negeri, yaitu keberadaan kampung warna-warni Jodipan di Kota Malang (Sulistyaningsih, Jainuri, Salahudin, Jovita, & Nurmandi, 2022). Sejak tahun 2016, kampung kumuh di daerah Jodipan ditata ulang untuk mengurangi kesan kumuh melalui pengecatan tembok dan genteng yang kemudian menarik perhatian wisatawan, yang kemudian bertransformasi menjadi kampung wisata dengan konsep kampung tematik. Terdapat 15 kampung tematik di Kota Malang dan empat diantaranya merupakan kampung yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, khususnya pionir utama kampung tematik di Kota Malang adalah Kampung Jodipan yang juga dikenal dengan sebutan Kampung Warna Warni Jodipan.

Tujuan dari intervensi penataan peningkatan kualitas permukiman informal adalah untuk memunculkan pengembangan pariwisata yaitu untuk mengubah perilaku manusia dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, perlu diperhatikan bahwa pengembangan pariwisata di permukiman informal harus dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peran pemerintah dan masyarakat lokal sangat diperlukan untuk bersinergi bersama dalam proses pengembangan pariwisata. Hal tersebut penting untuk memastikan distribusi manfaat yang merata serta memastikan pembangunan pariwisata tidak merugikan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pariwisata.

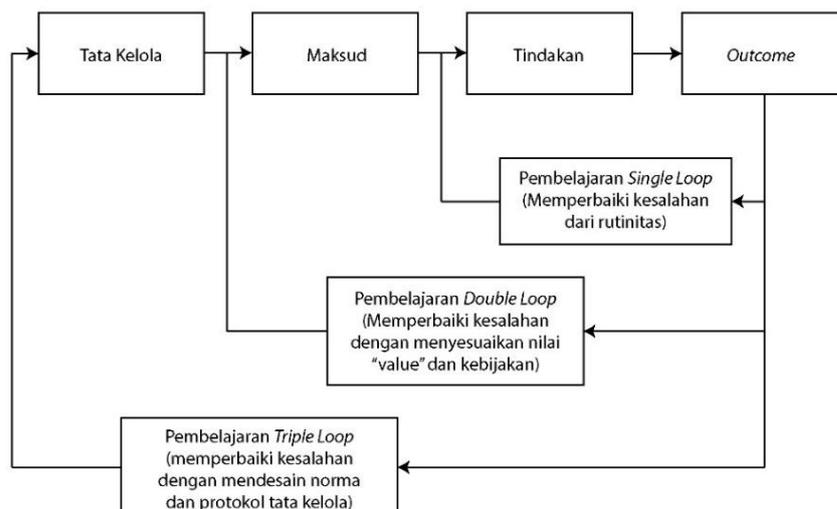
Mengacu pada tujuan yang ingin dicapai, berbagai model pembelajaran kemudian dikembangkan untuk menemukan efektivitas program perencanaan kawasan permukiman berbasis pengembangan pariwisata. Dalam konteks perubahan ini, kemudian mengarah pada pembelajaran sosial yang dikonsepsikan sebagai proses perubahan sosial yang mengarah pada signifikansi nilai-nilai keberlanjutan. Hingga saat ini, masih sedikit penelitian yang mengkaji keterkaitan pembelajaran sosial dalam pengembangan pariwisata pada permukiman informal.

KAJIAN PUSTAKA

Pembelajaran sosial merupakan proses di mana perubahan pemahaman terjadi dalam unit sosial yang lebih luas melalui interaksi sosial antara para aktor dalam jaringan sosial. Proses ini sering kali memunculkan tindakan kolektif dalam pembangunan dan menjadi metode untuk mencapai sistem pembelajaran di mana komunitas dapat belajar secara kolektif dalam menghadapi masalah yang kompleks (Reed et, al., 2010). Dalam konteks pembangunan, dinamika pembelajaran sosial menunjukkan bagaimana perubahan sosial terjadi melalui kesadaran bersama dan tindakan kolaboratif. Menurut (Ebrahim & Ortolano, 2001), terdapat tiga berbagai bentuk utama dari pembelajaran sosial dalam organisasi kelembagaan diantaranya yaitu:

1. ***Learning by Doing***: Proses pembelajaran ini terjadi melalui percobaan berulang-ulang. Organisasi cenderung mengulangi rutinitas yang berhasil dalam memenuhi target, sementara rutinitas yang dikaitkan dengan kegagalan kemungkinan besar tidak diulang (Levitt & March, 1988).
2. ***Learning by Exploring***: Proses pembelajaran ini terdapat eksplorasi sebagai cara melibatkan pencarian variasi, pengambilan risiko, eksperimen, bermain, fleksibilitas, penemuan, dan inovasi. Dalam bentuk pembelajaran ini, organisasi mencoba berbagai prosedur baru dan mengadopsi yang lebih baik daripada rutinitas yang ada, bahkan terkadang menggunakan prosedur atau ide yang belum terbukti atau mengembangkan yang baru (March, 1991).
3. ***Learning by Imitating***: Pembelajaran ini terjadi ketika satu organisasi mengadopsi struktur atau prosedur yang digunakan oleh organisasi lain. *Learning by imitating* dilakukan dengan mengadopsi konsep dan teknologi yang digunakan oleh organisasi lain (Ebrahim & Ortolano, 2001).

Bentuk dari transformasi tersebut dapat terjadi dari proses partisipasi dan keterlibatan yang dihasilkan melalui level pembelajaran *single-loop*, *double-loop*, dan *triple-loop* (Armitage et,al., 2008).



Gambar 1. Kerangka Pembelajaran *Multiple-Loop* untuk Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan (Armitage et, al., 2008).

Proses pembelajaran sosial mencakup refleksi asumsi dan kerangka berpikir untuk memberikan ruang bagi pemikiran dan tindakan baru dalam masyarakat. Dimana, pembelajaran sosial menggabungkan teori pembelajaran dari psikologi, teori tindakan kolaboratif dari sosiologi dan ilmu politik, serta prinsip-prinsip manajemen dari pembelajaran organisasi (Schusler et al., 2003). Proses ini sangat penting sebagai upaya pengelolaan sumber daya dan lingkungan, di mana interaksi sosial antara aktor dalam jaringan sosial dapat menghasilkan pengetahuan baru dan tindakan kolektif. Dalam pengelolaan sumber daya, proses pembelajaran sosial sangat dipengaruhi oleh dua elemen penting, yaitu relasi kekuasaan serta interaksi dan komunikasi. Kedua elemen ini memainkan peran krusial dalam mengarahkan dinamika sosial dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

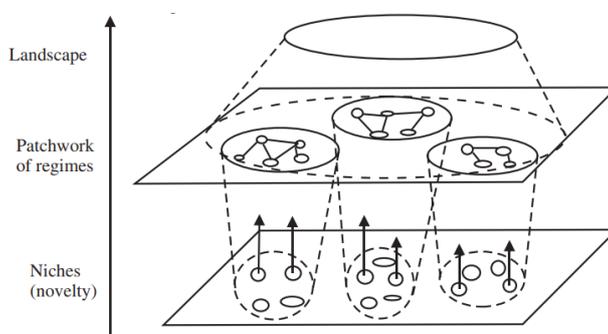
Relasi kekuasaan adalah jaringan kompleks di mana kekuasaan hadir di setiap aspek kehidupan sosial, mulai dari interaksi antar individu hingga struktur besar dalam masyarakat seperti negara dan institusi. Kekuasaan tidak hanya berada pada level makro tetapi juga beroperasi pada level mikro dalam interaksi sehari-hari. Foucault menyatakan, "Kekuasaan ada di mana-mana, dan ada dari segala tempat" (Foucault, 1978). Kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi tersebar dan terartikulasikan melalui hubungan sosial (Foucault & Gordon, 1980). Selain itu, kekuasaan selalu terkait dengan pengetahuan. Pengetahuan tidak netral, tetapi diproduksi dan digunakan untuk mengatur dan mengontrol populasi (Foucault, 1977). Sedangkan dalam interaksi dan komunikasi menekankan pada dialog musyawarah memungkinkan partisipan untuk menyampaikan pandangan, kepentingan, dan kebutuhan secara langsung (Schusler et al., 2003).

Mekanisme ini menciptakan keputusan yang lebih inklusif dan reflektif terhadap berbagai perspektif yang ada dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori komunikasi Habermas (1984) yang menekankan pentingnya situasi ideal berbicara di mana setiap partisipan memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan didengarkan. Dalam musyawarah, pemahaman bersama dan kesepakatan yang didasarkan pada rasionalitas dan konsensus, bukan pada paksaan atau dominasi satu pihak terhadap yang lain, sebagaimana tercermin dalam upaya membangun ruang pemahaman serta mengedepankan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sosial secara inklusif (Biky et, al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan wawancara mendalam. Peneliti memilih secara langsung informan yang telah diwawancarai dengan mempertimbangkan seberapa besar kemungkinan informan tersebut dapat memberikan informasi yang dapat mewakili pendapat umum masyarakat.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan utama yang perlu dilakukan dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan fokus pembahasan. Proses pengumpulan data ditujukan untuk merangkum berbagai informasi dari peristiwa atau dokumen yang diperoleh. Selanjutnya, pengumpulan data akan dilakukan berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh Creswell & Poth (2018) yang terbagi menjadi dua bentuk, yaitu melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Dalam mencapai tujuan penelitian yaitu memahami bagaimana perubahan yang terjadi melalui serangkaian tahapan proses pengembangan yang telah dilakukan dan memahami relasi sosio-teknis antar aktor dalam transisi perubahan, maka peneliti perlu menggunakan alat analisis yang dapat menjawab tujuan penelitian. Alat analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan alat analisis *Multi-Level Perspective* (MLP).



Gambar 2. Hirarki Multi-Level Perspective
(Geels et, al., 2015)

Analisis (Geels et, al., 2015) digunakan untuk memahami kemunculan dan penyebaran inovasi. Analisis ini tidak hanya pada tahap niche, tetapi juga pada rezim dan lanskap sosio-teknis, dan bagaimana interaksi antara ketiga level ini dapat mempengaruhi kemajuan inovasi dan transisi menuju sistem yang lebih berkelanjutan. Dalam Multi-Level Perspective Niche adalah ruang untuk inovasi radikal dan eksperimental yang berkembang tanpa tekanan pasar atau regulasi ketat, seperti proyek energi terbarukan atau *start-up* teknologi.

Sedangkan Rezim sosio-teknis adalah sistem yang mengatur aktivitas sehari-hari melalui teknologi dominan, infrastruktur, pasar, regulasi, dan budaya yang saling terkait, menciptakan stabilitas dan resistensi terhadap perubahan radikal. Kemudian yang terakhir adalah Landscape sosio-teknis mencakup faktor eksternal yang stabil dalam jangka panjang, seperti perubahan iklim dan tren demografis, yang membentuk konteks bagi rezim dan niche. Perubahan pada landscape dapat memberikan tekanan signifikan pada rezim, membuka peluang bagi inovasi dari niche. Transformasi sistemik terjadi ketika perubahan dalam landscape memberikan tekanan pada rezim, menciptakan peluang bagi inovasi dari niche untuk berkembang dan diadopsi secara lebih luas.

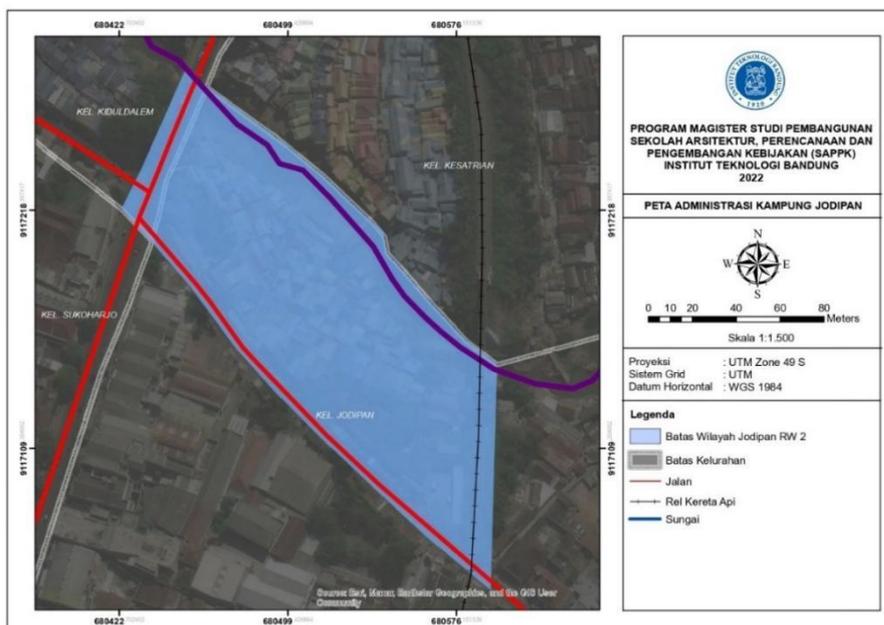
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Permukiman Informal Jodipan

Pemerintah Kota Malang telah memberlakukan peraturan zonasi yang ketat untuk mencegah pembangunan perumahan di sepanjang sungai Brantas untuk memastikan kelestarian lingkungan dan mengurangi bencana alam seperti banjir, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 Tahun 2022 (Afuw et, al., 2024). Permasalahan ini ditengarai oleh kurangnya layaknya kualitas kehidupan masyarakat yang tinggal pada kawasan tersebut, sehingga perlu adanya upaya peningkatan permukiman informal pada kawasan kumuh.

Menanggapi hal tersebut, terdapat upaya dalam mengurangi kekumuhan pada kawasan permukiman informal. Seperti yang terjadi pada kampung Jodipan dengan melakukan pengecatan kampung warna warni. Inisiatif ini bukan hanya berfungsi sebagai memperbaiki estetika kampung, namun juga sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Melalui pengecatan warna-warni yang menarik, kampung Jodipan berhasil menarik perhatian wisatawan dan media, yang pada gilirannya membawa dampak positif bagi ekonomi lokal (Irwandi et, al., 2023).

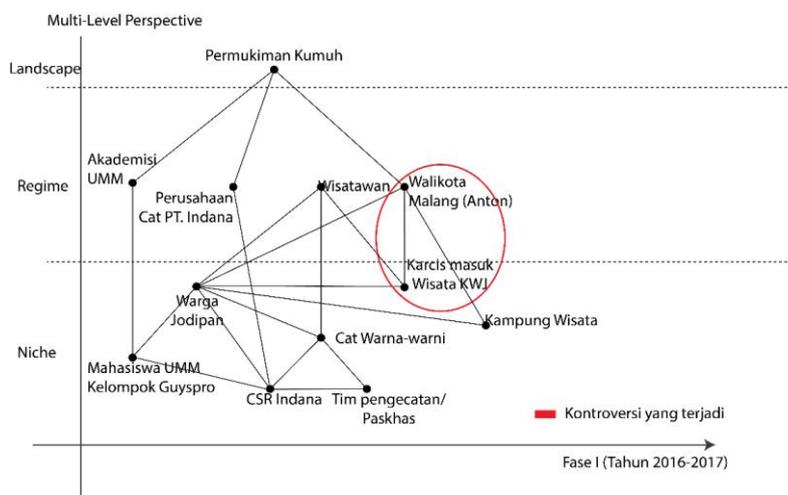
Upaya ini menunjukkan bahwa perubahan visual sederhana dapat memicu perbaikan yang secara mendalam diantaranya seperti peningkatan aksesibilitas, fasilitas umum, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan.



Gambar 3. Peta Kampung Jodipan (Olahan Peneliti, 2022)

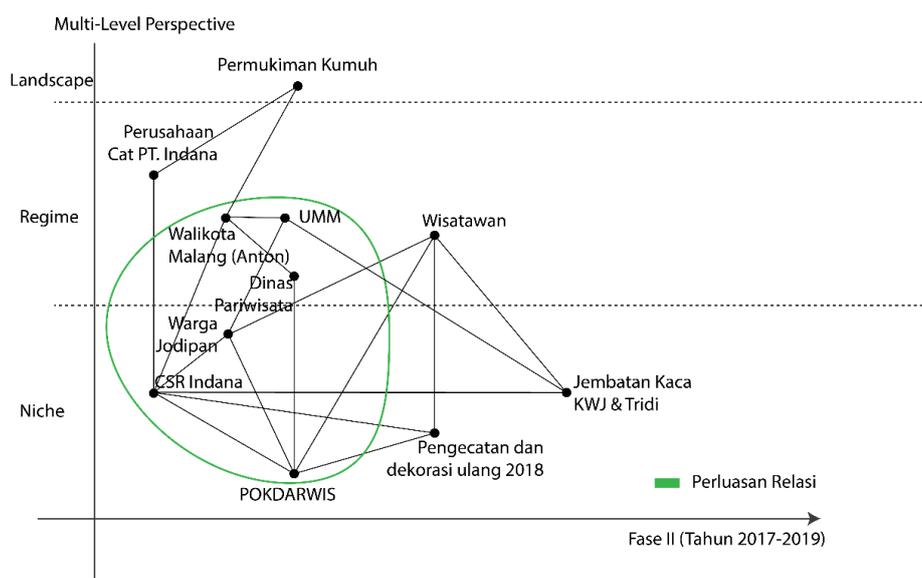
Analisis Multi Level Perspective (MLP): Transisi Perubahan pada Permukiman Informal Kampung Jodipan

Berdasarkan pembahasan yang diambil dari pengumpulan data primer dan observasi di lokasi penelitian, peneliti mencoba menggambarkan perubahan transisi pembelajaran di permukiman informal khususnya pada kampung Jodipan. Analisis ini digambarkan dalam kerangka Multi-Level Perspective (MLP) dengan melihat peran aktor. Analisis ini dapat dilihat pada gambar MLP sebagai berikut:



Gambar 4. Fase I Pembelajaran *Single Loop* (Olahan Peneliti, 2022)

Pada fase pertama dalam pembelajaran *single loop*, warga Kampung Jodipan telah membantu membangun relasi sejak awal proses perubahan Kampung Jodipan. Bentuk relasi tersebut diwujudkan dalam interaksi dialog dengan Guyspro, akademisi UMM, pihak kecamatan, dan warga kampung dalam mendiskusikan keberlanjutan kampung warna-warni sehingga dapat membentuk paguyuban pengelola pariwisata. Dengan demikian kebaharuan pengecatan warna-warni merupakan sebuah *niche* dalam mengembangkan pengetahuan baru terkait pengembangan pariwisata di permukiman informal.



Gambar 5. Fase II Pembelajaran *Double Loop* (Olahan Peneliti, 2022)

Pada fase kedua pembelajaran *double loop*, pengembangan kampung Jodipan akhirnya terjadi penyesuaian dan pengembangan guna mendukung keberlanjutan wisata kampung warna-warni Jodipan, seperti halnya pada transisi II melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang diinisiasi oleh rezim Dinas Pariwisata Kota Malang. Terbentuknya Pokdarwis sebagai suatu wadah pariwisata dapat menciptakan ide-ide untuk mengembangkan pengetahuan tambahan dalam bentuk pengecatan ulang dan dekorasi sebagai upaya menjaga keberlanjutan wisata kampung warna-warni Jodipan.

dan keberhasilan proyek. Dalam kasus Kampung Jodipan, kekuasaan terlihat dalam hubungan antara komunitas Guyspro, CSR Indana, pemerintah Kota Malang, dan BBWS Brantas.

Relasi antara komunitas Guyspro, CSR Indana, pemerintah Kota Malang, dan BBWS Brantas menggambarkan pentingnya tata kelola yang berintegritas, di mana kontrol otoritas harus berjalan berdampingan dengan etika dan kerja sama antarpihak. Sebagaimana yang diutarakan oleh Daniswara, Wibowo, Kiptyah, Khikmah, Farhana, Lindiawatie, Surachman, & Enala (2024) bahwa tanpa nilai kejujuran dan transparansi, inisiatif seperti penataan kawasan kumuh dapat terhambat oleh kendala administratif yang tidak efisien, sehingga memerlukan pendekatan yang jujur dan etis untuk memastikan keberhasilan pengelolaan.



Gambar 7. Peresmian Jembatan Kaca (Dokumentasi Peneliti, 2022)

Di tengah keberhasilan program pengecatan warna-warni kampung Jodipan mendapatkan perhatian publik, kemudian mendorong warga untuk melakukan legitimasi kepada pihak pemerintah kota Malang setelah adanya pengecatan tersebut. Dimana hal ini memunculkan dialog kesepakatan dengan walikota Malang M. Anton, sebagai figur kekuasaan lokal yang memainkan peran penting dalam mengukuhkan KWJ sebagai kampung tematik pada 4 September 2016. Dialog tersebut menentukan keberhasilan inisiatif lokal sering kali memerlukan pengakuan dan dukungan dari otoritas untuk memperkuat legitimasi dari kebijakan pembangunan (Daniswara, 2024).

Legitimasi ini kemudian memberikan peluang dalam upaya meningkatkan status KWJ dari sekadar kawasan kumuh menjadi destinasi wisata yang sah. Hal tersebut seperti yang dikemukakan Foucault bahwa kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi tersebar dan terartikulasikan melalui hubungan sosial (Foucault & Gordon, 1980). Relasi kekuasaan juga tampak dalam keterlibatan Dinas Pariwisata Kota Malang, yang berfungsi sebagai agen kekuasaan dalam konteks pariwisata. Pembentukan Kelompok Sadar

Wisata (POKDARWIS) di KWJ merupakan strategi pemerintah untuk mengarahkan dan mengatur kegiatan pariwisata.

Selanjutnya Dinas Pariwisata, dalam perannya memberikan panduan, masukan, dan menerima aspirasi dari warga, menciptakan sebuah struktur kekuasaan yang mengarahkan bagaimana KWJ dikembangkan dan dikelola. Dalam perspektif Foucault, kekuasaan bukan hanya terpusat pada institusi, tetapi juga terdistribusi dalam praktik sosial dan budaya. Dimana peran dinas Pariwisata tersebut memberikan pengawasan setiap individu dan mengkondisikan perilaku masyarakat (Foucault, 1977). Disamping itu, terdapat ide kebaruan penambahan destinasi berupa Jembatan Kaca yang diusulkan oleh Walikota Malang M. Anton dalam Rakernas Apeksi pada tahun 2017 yang menunjukkan bagaimana kekuasaan politik dapat mempengaruhi keputusan dan arah pengembangan wisata.

Jembatan Kaca berfungsi sebagai simbol tambahan yang memperkuat daya tarik wisata, menggambarkan bagaimana kekuasaan beroperasi untuk mengintegrasikan aspek simbolis dalam proyek pengembangan. Sebagaimana diutarakan oleh Foucault (1978) bahwa "Kekuasaan atas kehidupan berupaya mengatur kehidupan sehari-hari melalui berbagai metode disiplin dan regulasi".

Interaksi dan Komunikasi

Tindakan komunikatif memainkan peran penting dalam mencapai pemahaman dan konsensus dalam masyarakat. Habermas (1984) menekankan bahwa, komunikasi sebagai cara di mana setiap individu dalam masyarakat saling berbagi pengetahuan, mencapai pemahaman bersama, dan berpartisipasi dalam tindakan kolektif. Ini adalah dasar dari tindakan rasional dan kunci untuk transformasi sosial yang demokratis.

Dalam konteks ini, komunikasi yang rasional dan terbuka sangat penting untuk mengatasi berbagai persoalan dan mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. Bentuk interaksi pada masyarakat terlihat ketika pengelola kampung wisata, yaitu Pokdarwis KWJ, mengetahui adanya persoalan lingkungan di Kampung Warna-Warni Jodipan. Dengan komunikasi yang transparan, kelompok masyarakat dan organisasi lokal yang bergerak di bidang pembangunan dapat mampu mengelola potensi wilayah serta mengatasi persoalan bersama yang terjadi (Daniswara, 2024).

Selanjutnya, ketika kawasan Jodipan mulai berkembang menjadi destinasi wisata, pelibatan warga dalam kegiatan penataan permukiman kumuh tidak lagi hanya dilakukan melalui pengecatan. Selebihnya, dilakukan dengan menekankan melalui dialog interaktif dengan warga yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran dan perilaku yang peduli terhadap

pentingnya menjaga lingkungan kampung agar tidak kembali kumuh, serta menjaga kepuasan wisatawan yang berkunjung.

Dalam forum diskusi yang diadakan, ditetapkan anggota masyarakat yang bertugas melakukan piket harian untuk menjaga kebersihan kawasan, melaksanakan kerja bakti, dan mengevaluasi pengelolaan. Forum tersebut dibuka oleh Koordinator Pokdarwis KWJ dan dilanjutkan dengan diskusi mengenai berbagai persoalan dan solusi yang dapat diterapkan. Forum diskusi yang dibuka oleh Koordinator Pokdarwis KWJ mencerminkan praktik kepemimpinan lokal dan pengambilan keputusan kolektif yang memperkuat keterlibatan komunitas (Daniswara, 2024). Baik di Kampung Jodipan maupun di desa wisata lainnya, diskusi terbuka dan pelibatan masyarakat dalam tugas harian serta pemeliharaan lingkungan terbukti dapat meningkatkan keberlanjutan pariwisata.

Keterlibatan aktif melalui forum dan kerja bakti semacam ini dapat memperkuat struktur sosial dan kohesi komunitas, yang menjadi fondasi penting dalam mengelola tantangan dan peluang dalam pariwisata berbasis komunitas (Daniswara, 2024). Dengan demikian, segala kendala dapat diatasi melalui motivasi, penjelasan, dan diskusi musyawarah yang konstruktif. Melalui pendekatan komunikasi dan interaksi yang partisipatif, masyarakat dapat memahami pentingnya perubahan yang terjadi dan turut berkontribusi dalam mewujudkan lingkungan yang lebih baik. Menurut Habermas (1984) tindakan komunikasi yang rasional dan terbuka merupakan kunci untuk mencapai kesepakatan dan kerja sama dalam masyarakat, sehingga perubahan yang diinginkan dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Permukiman informal sering kali menghadapi masalah sosial, kesehatan, dan lingkungan. Salah satu solusi yang diadopsi adalah penataan ulang permukiman untuk menjadi destinasi wisata kreatif. Contoh sukses adalah Kampung Warna-Warni Jodipan di Malang, yang ditransformasi melalui pengecatan warna-warni, menarik wisatawan, dan meningkatkan ekonomi lokal. Melalui analisis *Multi-Level Perspective* (MLP) menunjukkan bahwa pembelajaran sosial dalam upaya penataan Kampung Jodipan melalui pengecatan warna-warni berhasil mengurangi kekumuhan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) oleh Dinas Pariwisata Kota Malang juga memainkan peran penting dalam mengelola dan menjaga keberlanjutan kampung wisata ini. Akan tetapi, pandemi COVID-19 memberikan tekanan pada pariwisata, yang menyebabkan penurunan jumlah wisatawan dan penutupan sementara.

Sementara itu, proses pembelajaran sosial tidak terlepas dari adanya relasi kekuasaan serta interaksi dan komunikasi. Relasi kekuasaan dalam penataan kawasan kumuh di Kampung Jodipan melibatkan inisiatif dari masyarakat dan sektor swasta, namun juga membutuhkan persetujuan dari otoritas seperti pemerintah Kota Malang dan BBWS Brantas. Relasi kekuasaan ini mencerminkan hierarki dan kontrol administratif yang mempengaruhi pelaksanaan keberlanjutan pengembangan pariwisata. Lebih jauh lagi, interaksi dan komunikasi melalui forum diskusi dan dialog interaktif warga dan pengelola wisata di Kampung Jodipan sebagai sarana berbagi pandangan, kebutuhan, dan solusi untuk menjaga kebersihan dan kepuasan wisatawan. Komunikasi yang terbuka dan partisipatif ini membantu menciptakan kesepahaman bersama dan tindakan kolektif untuk perubahan positif dalam keberlanjutan pariwisata pada permukiman informal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afuw, T., Koeswahyono, I. ., & Masykur, H. . (2024). Efforts to Prevent Land Changes Due to Natural Disasters in Tridi Village Malang City. *International Journal of Business, Law, and Education*, 5(2), 1529 - 1542. <https://doi.org/10.56442/ijble.v5i2.594>
- Armitage, D., Marschke, M., & Plummer, R. (2008). Adaptive co-management and the paradox of learning. *Global Environmental Change*, 18(1), 86–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2007.07.002>
- Biky, M., Bantali, A., Arjuna, A., Mutiasari, D., & Daniswara, N. (2025). Dampak Teknologi Informasi terhadap Interaksi Sosial Generasi Milenial di Masyarakat melalui Program GKI di Sorong, Papua. *YASIN*, 5(3), 1680-1708. <https://doi.org/10.58578/yasin.v5i3.5393>
- Creswell, J.W. & Poth, C.N. (2018) *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing among Five Approaches*. 4th Edition, SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks.
- Daniswara, N. (2024b). Pembangunan Wilayah Secara Endogen Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Potensi Desa Wisata. *Sosebi Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 78–93. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v4i1.9235>
- Daniswara, N., & Habib, M. A. F. (2024). Kohesi Sosial dan Ekonomi Dalam Pertanian Porang di Desa Selur, Ponorogo. *Juornal of Economics and Policy Studies*, 5(1), 55–65.
- Daniswara, N., Wibowo, A., Kiptyah, N. M., Khikmah, S. N., Farhana, H., Lindiawatie, L., Surachman, A., & Enala, S. H. (2024). Pendidikan Anti Korupsi.
- Daniswara, N., & Miradj, M. (2024). Integrating Sharia Economic Principles Into Chocolate Agribusiness: A Case Study of Nglanggeran Village, Gunungkidul Regency. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(1), 116-130. <https://doi.org/10.21274/an.v11i1.9922>
- Daniswara, N., & Sutinah. (2024). From Religious Spirit to Social Innovation: Transforming Agricultural Tourism in Alamendah Based on Pesantren. *In Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 9(2), 51–63. <https://doi.org/10.32332/yjq8d786>



- Ebrahim, A., & Ortolano, L. (2001). Learning Processes in Development Planning a Theoretical Overview and Case Study. *Journal of Planning Education and Research*, 20(4), 448–463. <https://doi.org/10.1177/0739456X0102000409>
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Pantheon Books.
- Foucault, M. (1978). *The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction*. New York: Pantheon Books.
- Foucault, M., & Gordon, C. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. Pantheon Books.
- Gato, M. A., Costa, P., Cruz, A. R., & Perestrelo, M. (2020). Creative Tourism as Boosting Tool for Placemaking Strategies in Peripheral Areas: Insights From Portugal. *Journal of Hospitality & Tourism Research*, 46(8), 1500–1518. <https://doi.org/10.1177/1096348020934045>
- Geels, F. W., McMeekin, A., Mylan, J., & Southerton, D. (2015). A critical appraisal of Sustainable Consumption and Production research: The reformist, revolutionary and reconfiguration positions. *Global Environmental Change*, 34, 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.04.013>
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action, Vol. 1, Reason and the Rationalization of Society (Issue 2)*. Polity.
- Hassan, G. F. (2012). Regeneration as an approach for the development of informal settlements in Cairo metropolitan. *Alexandria Engineering Journal*, 51(3), 229–239. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.aej.2012.02.003>
- Irwandi, E., Sabana, S., Kusmara, A. R., & Sanjaya, T. (2023). Urban villages as living gallery: Shaping place identity with participatory art in Java, Indonesia. *Cogent Arts & Humanities*, 10(1), 2247671. <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2247671>
- Kim, M., & Holifield, R. (2024). Touristification, commercial gentrification, and experiences of displacement in a disadvantaged neighborhood in Busan, South Korea. *Journal of Urban Affairs*, 46(3), 509–527. <https://doi.org/10.1080/07352166.2022.2060115>
- Levitt, B., & March, J. G. (1988). *Organizational Learning*, Annual Review of Sociology Vol.14
- March, J. G. (1991). Exploration and Exploitation in Organizational Learning. *Organization Science*, 2(1), 71–87. <http://www.jstor.org/stable/2634940>
- Nassar, D. M., & Elsayed, H. G. (2018). From Informal Settlements to sustainable communities. *Alexandria Engineering Journal*, 57(4), 2367–2376. <https://doi.org/10.1016/j.aej.2017.09.004>
- Reed, M. S., Evely, A. C., Cundill, G., Fazey, I., Glass, J., Laing, A., Newig, J., Parrish, B., Prell, C., Raymond, C., & Stringer, L. C. (2010). What is Social Learning? *Ecology and Society*, 15(4). <http://www.jstor.org/stable/26268235>
- Reynaud, A. T. J. (2004). Migrants' Accounts of Rio: The Contribution of Affect to Remembering Place. *Space and Culture*, 7(1), 9–19. <https://doi.org/10.1177/1206331203256849>



- Schusler, T. M., Decker, D. J., & Pfeffer, M. A. X. J. (2003). Social Learning for Collaborative Natural Resource Management. *Society & Natural Resources*, 16(4), 309–326. <https://doi.org/10.1080/08941920390178874>
- Sulistyaningsih, T., Jainuri, J., Salahudin, S., Jovita, H. D., & Nurmandi, A. (2022). Can Combined Marketing and Planning-oriented of Community-based Social Marketing (CBSM) Project Successfully Transform the Slum Area to Tourism Village? A Case Study of the Jodipan Colorful Urban Village, Malang, Indonesia. *Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing*, 34(4), 421–450. <https://doi.org/10.1080/10495142.2021.1874590>
- Yuen, B., & Kumssa, A. (2011). Africa and Asia: Two of the World's Fastest Growing Regions. In B. Yuen & A. Kumssa (Eds.), *Climate Change and Sustainable Urban Development in Africa and Asia* (pp. 3–18). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-90-481-9867-2_1